

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan baik di lingkup nasional maupun wilayah harus sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan wilayah. Sehingga penyusunan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering mengalami penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dengan mengacu pada kondisi dan kebutuhan. Tujuan dari perencanaan pembangunan menurut Basuki (2008) adalah untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah agar sesuai dengan potensi alamnya dan dapat memanfaatkan potensi tersebut secara efisien. Maka masing-masing daerah mempunyai kebijakan penataan ruang dan rencana pembangunan sendiri-sendiri. Menurut Achya (2011), sesuai amanat PP 15/2010 tentang penyelenggaraan penataan tata ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun dapat dilakukan kajian atas kesesuaian muatan dengan pelaksanaannya di lapangan setiap 5 tahun sekali, apabila dalam rentang waktu perencanaan terdapat kendala yang menyebabkan kebijakan RTRW tidak dapat dilaksanakan dan nilai implikasinya dinilai tidak efektif, maka dapat dilakukan perubahan. Pada intinya, Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai pedoman untuk, perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang, mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keseimbangan perkembangan

antarwilayah serta antarsektor pembangunan, pengarahannya lokasi investasi dan penataan ruang (Basuki, 2008).

Gunung api Merapi yang meletus pada 26 Oktober 2010 yang lalu masih menyisakan masalah tentang ketimpangan pembangunan di kabupaten Magelang. Banyak sektor ekonomi yang belum bangkit sepenuhnya, khususnya sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di kabupaten Magelang. Pertanian di wilayah kabupaten Magelang mengalami penurunan yang signifikan sampai sekarang akibat rusaknya lahan pertanian karena abu vulkanik semburan dari letusan gunung api Merapi (Wijayanti, 2010).

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Fachrurrazy, 2009).

Kedua undang-undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan agama serta moneter dan fiskal. Mengenai kewenangan pembiayaan yang

dilimpahkan kepada pemerintah daerah, daerah dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya tersebut tanpa campur tangan yang lebih dalam dari pemerintah pusat. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah yang akhirnya akan tercipta peningkatan pembangunan daerah. Sebab pembangunan daerah yang bertumpu pada pengembangan di bidang ekonomi dapat berdampak positif bagi bidang kehidupan yang lainnya serta dapat mendukung pencapaian tujuan perekonomian daerah. Konsep ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Todaro (2000) dalam Fachrurrazy (2009) yang menyatakan bahwa ada tiga komponen yang menjadi pedoman praktis dalam memahami pembangunan yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (1992:420) dalam Fachrurrazy (2009) adalah untuk membangun peralatan modal dengan skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakekat dari pembangunan ekonomi adalah untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Dalam pembangunan ekonomi ini, sektor pertanian masih diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan pendapatan nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan penyediaan bahan pangan (Winoto, 1995) dalam Ropingi (2004).

Sektor pertanian selama ini masih memegang peranan penting baik di tingkat nasional maupun tingkat regional, namun peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mencerminkan suatu proses transformasi struktural. Penurunan ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai proses yang bekerja di sisi permintaan, penawaran dan pergeseran kegiatan. Meskipun terjadi penurunan di sektor pertanian dalam perekonomian nasional bukan berarti bahwa sektor tersebut kurang berarti (Ikhsan, dan Armand, 1993) dalam Ropingi (2004).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sudah seharusnya Kabupaten Magelang dalam menggali informasi lebih mengandalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut baik berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Untuk mendapatkan informasi itu perlu adanya kajian mengenai sektor pertanian. Sebab sektor pertanian merupakan sektor yang berperan aktif bagi pendapatan regional kabupaten magelang.

Secara geografis, kabupaten Magelang merupakan daerah agraris, maka pertumbuhan ekonominya sangat di pengaruhi oleh sektor pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2012), besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB tahun 2000 dan tahun 2011 mengalami pergeseran yang berarti. Secara persentase atas harga berlaku pada tahun 2000 sebesar 35,84%, sedangkan tahun 2011 sebesar 28,76%. Bila dilihat atas dasar harga konstan, juga mengalami penurunan yang cukup besar

yaitu 9,21%, sehingga sumbangan terhadap PDRB pada tahun 2011 menjadi 26,63%.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor dominan setelah sektor pertanian. Dari tahun 2000 ke tahun 2011 atas dasar harga berlaku menunjukkan besarnya kontribusi yang sedikit menurun yaitu tahun 2000 peranannya 18,72% menjadi 18,27% di tahun 2011. Begitu juga dengan dasar harga konstan, terjadi penurunan sebesar 0,21%.

Sektor perdagangan, restoran dan hotel mengalami penurunan sebesar 0,09% atas dasar harga berlaku. Atas harga konstan juga mengalami penurunan sebesar 0,6%, sehingga sumbangan terhadap PDRB pada tahun 2011 menjadi 14,48%. Sektor lainnya yang cukup besar sumbangannya terhadap perekonomian Kabupaten Magelang adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini mengalami kenaikan sebesar 5,88% bila dilihat atas dasar harga berlaku. Serta naik sebesar 6,38% bila dilihat atas harga konstan. Sehingga sumbangannya terhadap PDRB tahun 2011 adalah 19,01%.

Pergeseran kontribusi dari setiap sektor dalam perekonomian Kabupaten Magelang secara riil dimana unsur pengaruh harga dihilangkan nampak terjadi pada sektor pertanian turun 9,21%, sehingga tahun 2011 peranannya menjadi 26,63% dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang. Penurunan pada sektor pertanian pada giliran berikutnya akan memberikan peluang pada sektor jasa-jasa yang naik 6,38%, sehingga peranannya dalam PDRB menjadi 19,01%. Peranan sektor-sektor ekonomi dominan dapat dilihat di tabel 1.1.

Tabel 1.1.

**PERANAN BEBERAPA SEKTOR EKONOMI YANG DOMINAN DI  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2000 DAN 2011(%)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2000	2011	Perubahan	2000	2011	Perubahan
Pertanian	35,84	28,76	-7,08	35,84	26,63	-9,21
Industri Pengolahan	18,72	18,72	-0,45	18,72	18,51	-0,21
Perdagangan, Restoran dan Hotel	15,08	14,99	-0,09	15,08	15,08	-0,06
Jasa-jasa	12,63	18,51	5,88	12,63	12,63	6,38
Jumlah/total	82,27	80,53	-1,74	82,27	78,63	-3,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang tahun 2012

Meletusnya gunung api Merapi menyebabkan wilayah di sekeliling gunung Merapi, termasuk kabupaten Magelang mengalami kemunduran kondisi dan penurunan berbagai potensi yang dimiliki wilayah kabupaten Magelang dibanding sebelum terjadi erupsi.

Dengan demikian dipandang perlu adanya suatu masukan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan mengacu pada kondisi, potensi dan permasalahan yang ada setelah terjadinya erupsi tersebut. Pemerintah daerah kabupaten magelang dengan otonomi daerahnya dapat mengatur kembali kebijakan-kebijakan untuk membangkitkan perekonomian melalui potensi-potensi daerah dengan menggunakan konsepsi perencanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, yang mengacu pada arahan

pembangunan nasional maupun pembangunan regional, serta menggunakan basis data kondisi dan potensi yang masih dimiliki oleh wilayah kabupaten Magelang pasca bencana (MUSRENBANG, 2011).

Dari uraian di atas, peneliti mencoba untuk meneliti tentang strategi pengembangan di sektor pertanian dalam perekonomian kabupaten Magelang pasca bencana erupsi Merapi dalam rentang waktu pengamatan dari tahun 2007 sampai 2011.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan dari penelitian mengenai analisis strategi pengembangan sektor pertanian di kabupaten Magelang pasca erupsi Merapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah erupsi Merapi?
2. Bagaimanakah kontribusi masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah erupsi Merapi?
3. Bagaimanakah laju pertumbuhan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah erupsi Merapi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian pada tahun-tahun sebelum erupsi Merapi dan sesudah erupsi Merapi.

2. Untuk mengetahui perbandingan kontribusi masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah erupsi merapi, sehingga dapat diketahui sumber-sumber perekonomian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi sektor basis untuk mendukung perekonomian Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui pengaruh erupsi merapi terhadap sektor pertanian maupun sektor non pertanian di Kabupaten Magelang, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

#### **1.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). Dengan rentang waktu penelitian selama lima tahun yaitu dari tahun 2007 sampai 2011. Menurut Hendayana (2003), metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan diakomodasi oleh Miller dan Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut Hood, *Location Quotient* adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004) sebagai berikut:



$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \dots\dots\dots(1.1)$$

Dimana, LQ adalah *Location Quotient*,  $v_i$  adalah output sektor  $i$  di suatu wilayah,  $V_i$  adalah output sektor  $i$  di tingkat nasional,  $v_t$  adalah output total wilayah, dan  $V_t$  adalah output total nasional. Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga kriteria yaitu,

1.  $LQ > 1$ . Artinya sektor  $i$  menjadi sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor  $i$  memiliki keunggulan komparatif, sehingga hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan wilayah akan tetapi juga dapat di ekspor keluar wilayah.
2.  $LQ < 1$ . Artinya sektor  $i$  bukan menjadi sektor basis, produksi sektor  $i$  di wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu pasokan dari luar.
3.  $LQ = 1$ . Artinya sektor  $i$  tergolong sektor non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksi sektor  $i$  hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk di ekspor.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Magelang.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi mengenai peran dan fungsi sektor basis dalam perekonomian beserta teori-teori relevan serta penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, serta jenis dan sumber data.

### **BAB 1V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Mengenai hasil dan analisis yang menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini akan di ulas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan analisis data dan pembahasannya serta berisi saran-saran untuk melengkapi kekurangan dari penelitian yang dilakukan.

